

ANALISIS EFEKTIVITAS HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Kahar Muda^{*1}, Muhammad Idris², Salim Sultan³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}kaharmuda@gmail.com, ²muhammadidris@stienobel-indonesia.ac.id, ³salim@stienobel-indonesia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Untuk menganalisis efektifitas hasil reses anggota DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba. (2) Untuk menganalisis peran anggota DPRD dalam proses perumusan kebijakan di Kabupaten Bulukumba. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil III Kecamatan Bulukumba dan Rilau Ale. Informan dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota DPRD Kabupaten Bulukumba daerah pemilihan III Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale, serta masing-masing 2 Kepala desa dan 1 Lurah di Kecamatan Bulukumba dan 3 orang kepala desa di Kecamatan Rilau Ale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Khususnya daerah pemilihan III Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale sudah efektif dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba. (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Khususnya Daerah Pemilihan III Kecamatan Bulukumba dan Rilau Ale sudah berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan di Kabupaten Bulukumba.

Kata kunci : Efektivitas, Reses, dan Penetapan APBD

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze: (1) To analyze the effectiveness of the recess results of DPRD members in the process of preparing and determining the Regional Expenditure Budget for Bulukumba Regency. (2) To analyze the role of DPRD members in the policy formulation process in Bulukumba Regency. This research approach is a qualitative approach. The research was conducted at the DPRD Office of Bulukumba District Dapil III, Bulukumba and Rilau Ale Districts. The informants in this study were 3 members of the DPRD Bulukumba Regency, electoral area III, Bulukumba District and Rilau Ale District, as well as 2 village heads and 1 village head in Bulukumba District and 3 village heads in Rilau Ale District. The results of the study show that: 1) The results of the recess for members of the Regional People's Legislative Council of Bulukumba Regency, especially the electoral district III of Bulukumba District and Rilau Ale District, have been effective in the process of preparing and determining the Regional Expenditure Budget of Bulukumba Regency. (2) Members of the Regional People's Representative Council of Bulukumba Regency, especially Electoral District III of Bulukumba and Rilau Ale Districts, have played an active role in the process of formulating policies in Bulukumba Regency.

Keywords: Effectiveness, Recess, and APBD Determination

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan otonomi daerah dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpung, menampung dan

menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kewajiban anggota DPRD Kabupaten/ Kota diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 161 huruf (i) menyerap dan menghimpung aspirasi, dan aduan-aduan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Lembaga legislatif tidak seharusnya hanya diartikan sebagai badan yang bertugas untuk membuat undang-undang (law-making body) semata-mata, tetapi juga sebagai perantara rakyat kepada pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 30 huruf (i) menyerap dan menghimpung aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) menampung dan menindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moran dan secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Salah satu fungsi DPRD untuk mengartikulasikan dan agregasi kepentingan rakyat, juga menempatkan konstituen sebagai unsur yang perlu diperhatikan dan merupakan proses politik yang paling mendasar sebagai tuntutan relasi antara yang diwakili dan yang mewakili.

Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu dengan melakukan komunikasi antar keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituen hal yang wajib yang tidak bisa dilakukan oleh wakil rakyat, rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkan kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan publik.

Salah satu bentuk komunikasi antara wakil rakyat dan terwakili adalah melalui kegiatan reses DPRD. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaan pokok-pokok pikiran DPRD (hasil reses), antara lain sebagai berikut : 1) penyampaian usulan DPRD dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD; 2) pertimbangan atau susulan; 3) indikator kerja yang diusulkan; 4) pengecekan oleh RKPD terhadap kebutuhan rill dilapangan dengan mempertimbangkan azas manfaat, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas; 5) dirumuskan dalam rencana awal RKPD. Maka segala sesuatu yang berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba akan ditampung dalam RKPD untuk selanjutnya diadopsi kedalam kebijakan umum APBD dan Prioritas anggaran sementara Kabupaten Bulukumba tahun anggaran berikutnya.

Untuk ditingkat Desa, penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan melalui Musrenbang. Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”. Pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai media yang tepat guna melibatkan seluruh pemangku kepentingan

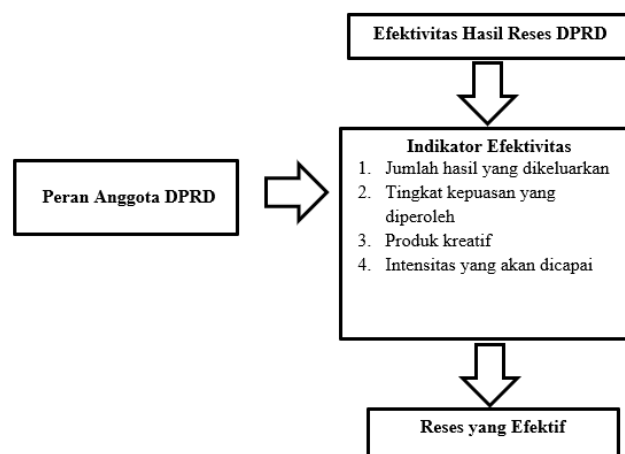
menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menyeimbangkan dan menyebarkan informasi tentang isu strategis bersama, ketersediaan sumberdaya serta alternatif tindakan yang harus melalui kerjasama pembangunan sesuai dengan tujuan dari musrenbang itu sendiri.

Sayangnya, kegiatan musrenbang belum terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan reses Anggota DPRD diharapkan mampu menyeimbangkan ketimpangan yang terjadi dalam kegiatan musrenbang desa, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tentang efektivitas hasil reses DPRD Kabupaten Bulukumba di daerah pemilihan III (Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale), peneliti ingin melihat perkembangan kinerja pemerintah Kabupaten Bulukumba baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan bagi daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulis sehingga terilhami untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hasil reses anggota DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana peran anggota DPRD dalam proses perumusan Kebijakan di Kabupaten Bulukumba?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba dan dilaksanakan pada bulan November - Desember 2022.

Adapun informan pada penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan III (Kecamatan Bulukumpa- Rilau Ale) yaitu sebanyak 3 orang. Selain anggota dewan, informan pada penelitian ini adalah 2 kepala desa dan 1 orang lurah di kecamatan Bulukumpa dan 3 orang kepala desa di Kecamatan Rilau Ale.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Observasi dan Wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Informan

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Syarifuddin	Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil III
2.	A. Zulkarnain Pangki	Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil III
3.	Hj. Aminah	Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil III
4.	Jusman	Kepada desa Karam
5.	Baharuddin	Kepada desa Bonto Haru
6.	Risman	Kepada desa Bonto Manai
7.	Gito Sukamdanni	Kepada desa Salassae
8.	Andi Mappasibbi	Lurag Ballasaraja
9.	Hj. Marniati	Kepada desa Jojjolo

Deskripsi hasil wawancara Informan

Berikut uraian hasil wawancara informan yang disampaikan kepada penulis

1. Nama : H. Syarifuddin

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba

Pertanyaan	Jawaban
Selamat pagi bapak H. Syarifuddin, Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin mewancarai bapak tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, Bapak salah satu informan, mohon kesediannya pak?	Selamat pagi pak, boleh, silahkan.
Apakah bapak selaku anggota DPRD selalu melakukan kunjungan ke masyarakat di daerah pemilihan bapak?	iya, kami dengan teman-teman anggota DPRD dari daerah pemilihan III sering melakukan kunjungan ke masyarakat setiap masa reses
Bagaimana respon masyarakat terkait kegiatan reses itu sendiri pak?	Respon masyarakat itu sangat baik terhadap bantuan yang kita berikan untuk meningkatkan kesejahteraannya
Apa saja yang dilakukan dalam kegiatan kunjungan bapak?	Yah selain mendengar aspirasi masyarakat terkait permasalahan mereka, juga ada banyak pelatihan-pelatihan yang pemerintah laksanakan di setiap Kecamatan maupun setiap Desa dan Kelurahan, seperti pelatihan menjahit bagi ibu PKK, pelatihan wirausaha, serta

Pertanyaan	Jawaban
	penyuluhan pertanian, seminar bahaya narkoba, dan bahaya HIV AIDS
Apakah semua aspirasi masyarakat desa/kelurahan bisa diajukan dalam rapat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba	Setelah hasil reses diparipurnakan bersama Kepala Daerah, SKPD dan pihak yang bersangkutan lainnya. Lalu dibahas di Komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dokumentasi hasil reses selanjutnya disebut pokok pokok pikiran DPRD akan dibahas dalam forum SKPD bersama dengan hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan. Setelah itu dilaksanakan forum Musrenbang Kabupaten Bulukumba untuk menghasilkan RKPD. Hasil Reses ditampung saat perencanaan tepatnya saat penyusunan RKPD

2. Nama : A. Zulkarnain Pangki
 Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba

Pertanyaan	Jawaban
Selamat pagi bapak A.Zulkarnain Pangki, Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin mewancarai bapak tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, Bapak salah satu informan, mohon kesediannya pak?	Selamat pagi. Iya boleh.
Bagaimana menurut bapak terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, apakah efektif dalam menampung aspirasi desa dan keluarahan.	Ya menurut saya sangat efektif, selain reses yang biasa kita lakukan di desa- desa kita juga melakukan reses ditingkat kecamatan, sehingga aspirasi dari setiap desa akan sampai kepada kita selaku anggota dewan dan selanjutnya akan dibahas pada tingkat kabupaten.
Bagaimana tindak lanjut keluhan dan aspirasi masyarakat pak?	Untuk tindak lanjut, aspirasi dan keluhan masyarakat kita rasa dapat langsung diatasi, kita akan panggil pihak-pihak Dinas terkait, dan kita bahas di Komisi untuk kemudian dapat kita cari solusi permasalahannya. Misalnya terkait pengurusan KTP dan Kartu Keluarga, kita panggil dari pihak Catatan Sipil untuk duduk bersama dan memberikan usulan ataupun saran yang sifatnya

Pertanyaan	Jawaban
	“menuntut”. Dan untuk aspirasi masyarakat yang sifatnya lebih berat akan kita tampung diusulan pembangunan/kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dibahas selanjutnya dan kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat
Bagaimana menurut bapak terkait terkait kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat?	pemberian pelatihan sangat penting dilakukan dengan tujuan meningkatkan skil mengenai pemanfaatan-pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan mempergunakan bantuan modal yang diberikan
Apakah semua aspirasi masyarakat desa.kelurahan bisa diajukan dalam rapat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba	Tentu tidak semua program didesa bisa terealisasi di kabupaten, selain anggaran yang terbatas, tentu kita melihat dari segi prioritas kabupaten juga, apakah program yang diajukan ini tidak bisa ditinggalkan oleh dana desa, maka program itu akan menjadi prioritas di kabupaten. Maka dari itu desa/kelurahan perlu juga mengkaji program yang mereka ajukan, apakah memang program tersebut bisa di cover oleh kabupaten atau jangan sampai dana desa bisa menganggarkan kegiatan tersebut.

3. Nama : Hj. Aminah
 Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba

Pertanyaan	Jawaban
Selamat pagi ibu Hj Aminah, Mohon maaf mengganggu waktunya bu, saya ingin mewancarai ibu tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, ibu salah satu informan, mohon kesediannya bu?	Ya, silahkan pak.
Bagaimana menurut ibu terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, apakah efektif dalam menampung aspirasi desa dan kelurahan.?	Ya tentu reses merupakan salah satu wadah yang bisa menampung aspirasi dan program-program yang ada di desa/kelurahan sehingga program tersebut bisa diajukan ke tingkat kabupaten
Apa saja yang masyarakat sampaikan pada saat reses?	Ada beberapa aspirasi ataupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pada

Pertanyaan	Jawaban
	pelaksanaan reses, seperti perbaikan irigasi, bantuan traktor dan perbaikan akses jalan tani. Sedangkan selebihnya mengarah pada masalah sosial di masyarakat atau pelayanan publik, termasuk masalah-masalah yang bersangkutan dengan pembuatan KTP, Akte nikah dan pengurusan KK
Bagaimana peran anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat kabupaten?	Kami sebagai Anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat, tentunya kami selalu memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan rakyat baik dalam sidang paripurna hasil reses maupun dalam proses Perumusan Kebijakan Pemerintah. selain itu kami Anggota DPRD selalu terlibat aktif dalam diskusi peninjauan dan evaluasi usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang serta pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat supaya betul-betul tersalurkan
Apakah semua aspirasi masyarakat desa.kelurahan bisa diajukan dalam rapat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba?	Selagi program tersebut memang masuk dalam prioritas kabupaten, tentu program yang desa/kelurahan ajukan akan dianggarkan di kabupaten.

4. Nama : Jusman
 Jabatan : Kepala Desa Karama

Pertanyaan	Jawaban
Selamat Siang bapak Jusman, Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin mewancarai bapak tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, Bapak salah satu informan, mohon kesediannya pak?	Iye, boleh pak.
Bagaimana menurut bapak terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, apakah efektif dalam menampung aspirasi desa dan kelurahan.?	Kami sangat terbantu dengan kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD, karena kami bisa mengajukan program-program dari desa kami dengan harapan mendapatkan bantuan dari kabupaten.
Apakah program yang bapak ajukan ada yang dianggarkan di kabupaten?	Kalau bantuan dari pemerintah yang sering masyarakat dapat yaitu pupuk,

	ada juga mesin traktor, dan perbaikan jalan tani
--	--

5. Nama : Baharuddin
 Jabatan : Kepala Desa Bonto Haru

Pertanyaan	Jawaban
Selamat Siang bapak Baharuddin, Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin mewancarai bapak tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, Bapak salah satu informan, mohon kesediannya pak?	Selamat siang pak. Iye bisa pak.
Bagaimana menurut bapak terkait kegaitan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, apakah efektif dalam menampung aspirasi desa dan kelurahan.?	Kebijakan pemerintah selama ini sudah sesuai dengan harapan kami selaku masyarakat desa karna kalau ada bantuan dari pemerintah baik itu bantuan alat pertanian ataupun modal usaha, alhamdulillah msyarakat yang memang betul-betul membutuhkan bisa merasakan bantuan tersebut, seperti kelompok tani dan pelaku UMKM
Apakah program yang bapak ajukan ada yang dianggarkan di kabupaten?	Iye tahun lalu desa saya dapat bantuan traktor untuk kelompok tani

6. Nama : Risman
 Jabatan : Kepala Desa Bonto Manai

Pertanyaan	Jawaban
Selamat Siang bapak Risman, Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin mewancarai bapak tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, Bapak salah satu informan, mohon kesediannya pak?	Iye pak selamat siang. Bisa ji pak
Bagaimana menurut bapak terkait kegaitan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, apakah efektif dalam menampung aspirasi desa dan kelurahan.?	Iye sangat efektif karena program di desa bisa dianggarkan di kabupaten
Apakah pemerintah juga sering melakukan peningkatan kualitas SDM, bukan hanya bantuan perbaikan infrastruktur?	iya masyarakat kami pernah mengikuti penyuluhan pertanian di Kecamatan Rilau Ale, pada penyuluhan itu diajarkan cara-cara bagaimana

Pertanyaan	Jawaban
	menanam, menggunakan pupuk supaya bisa meningkatkan hasil pertanian padi. Bapak penyuluh menganjurkan petani menggunakan pupuk non kimia atau pupuk kompos supaya hasil pertaniannya meningkat dan menggunakan bibit padi yang unggul
Apakah program yang bapak ajukan ada yang dianggarkan di kabupaten?	Ada, bantuan alat pertanian

7. Nama : Gito Sukamdani
 Jabatan : Kepala Desa Salassae

Pertanyaan	Jawaban
Selamat Siang bapak Gito, Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin mewancarai bapak tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, Bapak salah satu informan, mohon kesediannya pak?	Selamat siang pak. Iya boleh pak.
Bagaimana menurut bapak terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, apakah efektif dalam menampung aspirasi desa dan kelurahan.?	Menurut saya kegiatan reses ini sangat membantu kami selaku aparatur desa, yang berharap ada bantuan dari pemerintah kabupaten khususnya terhadap program-program prioritas yang ada di desa agar kiranya bisa terealisasi.
Apakah program yang bapak ajukan ada yang dianggarkan di kabupaten?	Untuk desa Salassae sendiri, sudah ada beberapa program yang sudah terealisasi yaitu perbaikan jalan yang memang jalan tersebut merupakan jalan kabupaten,, sehingga di desa tidak bisa dianggarkan dan ada beberapa bantuan alat pertanian karena memang di desa salassae ini mayoritas adalah petani.

8. Nama : Hj. Marniati
 Jabatan : Kepala Desa Jojjolo

Pertanyaan	Jawaban
Selamat Siang ibu Hj.Marniati, Mohon maaf mengganggu waktunya bu , saya ingin mewancarai ibu tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan	Siang pak, iye boleh pak

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, ibuk salah satu informan, mohon kesediannya bu?	
Bagaimana menurut ibu terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, apakah efektif dalam menampung aspirasi desa dan kelurahan.?	Menurut saya reses ini sangat efektif apalagi disini kita bisa mengajukan program-program skala prioritas di desa yang tidak bisa kami anggarkan.
Apa saja aspirasi masyarakat yang sering kali disampaikan pada saat reses?	Biasanya kalau ada anggota DPRD datang ke Desa kami, kebanyakan masyarakat sampaikan kepada anggota DPRD seperti mengharapkan bantuan berupa mesin traktor, pupuk, perbaikan jalan tani, dan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM
Apakah program yang ibu ajukan ada yang dianggarkan di kabupaten?	Ya, alhamdulillah untuk desa Jojjolo, sudah pernah dapat bantuan mesin jahit, alat pertanian seperti traktor, dan sudah ada perbaikan jalan.

9. Nama : Andi Mappasibbi
 Jabatan : Lurah Ballasaraja

Pertanyaan	Jawaban
Selamat Siang bapak Gito, Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin mewancarai bapak tentang judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba”, Bapak salah satu informan, mohon kesediannya pak?	Iye boleh pak
Siapa saja anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang sering melakukan kunjungan ke wilayah kerja bapak.	Iya, ada beberapa orang anggota DPRD yang perna datang ke daerah kami, seperti bapak A. Zulkarnain Pangki, Ibu Hj. Aminah, Bapak Kahar Muda, dan bapak Khairul Ibrahim
Bagaimana menurut bapak terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, apakah efektif dalam menampung aspirasi desa dan kelurahan.?	Saya rasa kegiatan reses ini sangat efektif yah, karena memang yang kita ajukan ke anggota dewan itu program-program yang memang prioritas di kelurahan jadi kita tinggal menunggu apakah program kita ini bisa di anggarkan di kabupaten.
Apakah program yang bapak ajukan ada yang dianggarkan di kabupaten?	Iye alhmdulillah kalau untuk program, keluarahan Ballasaraja sudah dapat perbaikan jalan.

PEMBAHASAN

Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki peran penting dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, anggota DPRD diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi-aspirasi rakyat yang telah ditampung dalam masa rese DPRD yang sudah di sahkan dalam rapat paripurna DPRD, diharapkan hasil reses anggota DPRD dapat diimplementasikan menjadi kebijakan Pemerintah. Pada khususnya Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil III Kecamatan Bulukumba dan Rilau Ale sesuai dengan kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota yang secara spesifik di dalam Undang-undang No.23 pasal 161 huruf (i)menyerap aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Hal ini sangat diharapkan kepada anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil III Kecamatan Bulukumba dan Rilau Ale supaya benar-benar memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bulukumba yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat bersama.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh Efektivitas Hasil Reses DPRD dalam Perumusan Kebijakan di Kabupaten Bulukumba, peneliti menggunakan indikator- ndikator yang meliputi : 1) jumlah hasil yang dikeluarkan 2.) ,tingkat kepuasan yang diperoleh, 3.) produk kreatif. Dan d) intensitas yang akan dicapai

Hasil pengkajian terhadap ke empat indikator tersebut adalah :

1. Jumlah Hasil yang dikeluarkan

Hasil tersebut berupa aspirasi-aspirasi rakyat yang ditampung dalam bentuk hasil reses DPRD yang diperoleh pada setiap Daerah Pemilihan dapat ditindaklanjuti menjadi bentuk kebijakan Pemerintah Daerah. DPRD Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah-langkah dan persiapan demi efektifnya tugas mereka. begitu juga dengan kegiatan reses dalam menampung aspirasi dan aduan-aduan masyarakat, tidak berjalan dengan efektif tanpa melakukan persiapan yang matang, untuk itu perlu langkah-langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya tergantung pada perencanaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam mempersiapkan tugasnya dalam kegiatan reses adalah (1) Rapat pimpinan dan Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan (2) penjelasan pelaksanaan reses oleh ketua DPRD dan sekretaris DPRD Kabupaten Bulukumba..

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai aktor dalam perumusan kebijakan Kabupaten Bulukumba, seperti halnya dengan DPRD lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang juga bertugas melaksanakan reses sebagai bentuk tanggungjawab terhadap konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing.

Empat puluh orang anggota DPRD Kabupaten Bulukumba telah melakukan kegiatan reses dalam bentuk pertemuan , dialog, diskusi dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak H.Syarifuddin selaku Anggota DPRD Dapil III mengatakan bahwa: “iya, kami dengan teman-teman anggota DPRD dari daerah pemilihan III sering melakukan kunjungan ke masyarakat setiap masa reses”

Sehubungan dengan penjelasan bapak tersebut dapat diketahui bahwa anggota DPRD telah melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat dan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dengan pemerintah. Anggota DPRD telah melakukan kunjungan kerja kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan konstituennya.

Penulis mewawancarai salah satu lurah untuk memperkuat bukti yang telah dikatakan oleh Bapak H. Syafruddin dengan masyarakat tersebut bernama Andi Mappasibbi yang menyatakan :

“Iya, ada beberapa orang anggota DPRD yang pernah datang ke daerah kami, seperti bapak A. Zulkarnain Pangki, Hj. Aminah, Kahar Muda, dan Khairul Ibrahim”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu lurah untuk memperkuat hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Daerah Pemilihan III bahwa benar adanya kunjungan anggota DPRD ke konstituennya untuk melakukan komunikasi politik guna menjangkau aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya untuk digunakan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.

Pada setiap pelaksanaan kunjungan anggota DPRD ke konstituennya guna untuk menjangkau aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat pada daerah pemilihan III di Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale, masyarakat sangat berantusias menyambut anggota DPRD yang melakukan kunjungan reses untuk menyampaikan aspirasi ataupun permasalahan yang ada pada pelayanan publik ataupun mengusulkan adanya program pemberdayaan masyarakat.

Sesuai hasil observasi peneliti di lapangan menyatakan bahwa anggota DPRD ada beberapa memang sering melaksanakan kunjungan ke konstituennya di Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale baik pada pelaksanaan reses maupun pada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam kunjungan tersebut masyarakat sangat berantusias menyampaikan keluhan ataupun aduan-aduan serta bantuan-bantuan program yang masyarakat butuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Sehingga sesuai hasil teori Legislatif oleh Jimly Asshiddiqie dalam Efriza dapat diintegrasikan bahwa anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab secara individu untuk menyuara aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat terhadap masyarakat yang diwakili sebagai konstituennya.

Aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat pada pelaksanaan reses pada tahun yang lalu, ada beberapa yang sudah terealisasi yang dianggap sangat mendesak untuk kebutuhan masyarakat.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh

Ukuran untuk mengetahui hasil reses anggota DPRD dapat dilihat dengan berdasarkan pada mutu dan ketepatan kebijakan Pemerintah Daerah di kabupaten Bulukumpa. Oleh karena itu, selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan substansial seperti prioritas pembangunan, rasionalitas anggaran, namun kebutuhan masyarakat konstituen yang ditampung dalam hasil Reses Anggota DPRD khususnya pada Daerah Pemilihan III harus juga dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini anggota DPRD pada semua komisi harus melakukan pelaporan melalui sidang paripurna dengan agenda rapat tentang laporan komisi-komisi yang mengenai hasil reses. Sidang Paripurna perlu dilaksanakan sebab hasil reses akan sah

apabila telah dibahas di dalam paripurna yang dilaksanakan bersama dengan Kepala Daerah ataupun yang mewakili, serta SKPD-SKPD yang terkait.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota DPRD Bapak Andi Zulkarnain Pangki : “Untuk tindak lanjut, aspirasi dan keluhan masyarakat kita rasa dapat langsung diatasi, kita akan panggil pihak-pihak Dinas terkait, dan kita bahas di Komisi untuk kemudian dapat kita cari solusi permasalahannya. Misalnya terkait pengurusan KTP dan Kartu Keluarga, kita panggil dari pihak Catatan Sipil untuk duduk bersama dan memberikan usulan ataupun saran yang sifatnya “menuntut”. Dan untuk aspirasi masyarakat yang sifatnya lebih berat akan kita tampung diusulan pembangunan/kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dibahas selanjutnya dan kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa aspirasi dan aduan-aduan masyarakat yang bersifat mendesak yang sudah terjaring dalam hasil reses DPRD yang menyangkut dengan pelayanan publik yang kurang baik dan terkesan sistem yang berbelit-belit, langsung ditindaklanjuti oleh anggota DPRD dengan memanggil dinas terkait untuk membicarakannya bersama dan memberikan masukan dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Namun mengenai hal aspirasi sifatnya berat maka akan di masukkan ke dalam usulan pembangunan pemerintah yang akan dibahas bersama kepala daerah dan dinas-dinas terkait.

Kebijakan mendorong implementasi hasil reses, membutuhkan adanya regulasi yang mengatur bahwa pokok-pokok pikiran anggota DPRD harus menjadi prioritas dalam musrenbang dan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), serta diperlukan inovasi dalam perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi politik masyarakat diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan APBD.

Kebijakan yang berorientasi terhadap masyarakat dihasilkan dengan jalan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dimana untuk mendapatkan kebijakan partisipatif dilakukan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat.

Kunci kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD adalah letak pada kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap kualitas hasil reses merupakan hal yang harus diupayakan perwujudannya. Dalam melayani masyarakat diperlukan norma antara lain tentang kebenaran, pemenuhan janji kepada kepada publik, dan adil dalam memberikan pelayanan karena dengan hal itu kepercayaan masyarakat dapat bertambah.

3. Produk kreatif

Pelatihan ataupun pemberian penyuluhan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup. Pelatihan atau penyuluhan yang disampaikan harus tepat guna dan tepat sasaran dan mengetahui tentang bagaimana pengembangan untuk masyarakat.

Agar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah dituntut memberikan suntikan moral dan modal kepada masyarakat tentang bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan bantuan-bantuan yang diberikan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Andi Zulkarnain Pangki anggota DPRD Kabupaten Bulukumba bahwa : “pemberian pelatihan sangat penting dilakukan dengan tujuan meningkatkan skil mengenai pemanfaatan-pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan mempergunakan bantuan modal yang diberikan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa mengenai hal Sumber Daya Manusia, pemerintah telah melaksanakan pemberian beberapa pelatihan lewat kampanye-kampanye penyuluhan ataupun seminar-seminar yang telah dilaksanakan pada setiap Desa dan Kelurahan. Dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu masyarakat dapat menambah skil baik dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada maupun dengan pengembangan usaha-usaha rakyat, juga dapat mengelolah pertanian dengan baik dan benar sesuai metode-metode dari dinas pertanian agar dapat meningkatkan hasil pertanian di setiap daerah.

Pemberian pelatihan atau penyuluhan terhadap masyarakat memang memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan hidup khususnya masyarakat petani dan pelaku UMKM di Kecamatan Bulukumba dan Rilau Ale yang Sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tapi kapasitasnya masih minim karena pengetahuan yang mereka miliki berdasarkan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat pendahulunya, untuk itu di tuntut peran pemerintah agar bisa menambah pengetahuan mereka karena era teknologi yang semakin canggih saat ini.

Berdasarkan hasil observasi lapangan menyatakan bahwa masyarakat petani pada umumnya yang telah diberikan penyuluhan ataupun pelatihan mengenai cara penanaman, pemupukan, penggunaan bibit unggul dari pihak Dinas pertanian agar adanya peningkatan hasil produksi pertanian.

4. Intensitas yang akan dicapai

Intensitas yang akan dicapai adalah ukuran sejauh mana manfaat dan dampak dari hasil reses DPRD Kabupaten Bulukumba khususnya pada Daerah Pemilihan III di Kecamatan Bulukumba dan Rilau Ale terhadap kebutuhan masyarakat. Manfaat hasil reses DPRD dapat dilihat dari penggunaan hasil reses DPRD dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Kebijakan –kebijakan Pemerintah diharapkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun segala sesuatu yang akan dicapai berkenaan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Bulukumba akan ditampung dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk selanjutnya diadopsi dalam kebijakan umum APBD.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Bapak H. Syarifuddin yang mengatakan bahwa : “Setelah hasil reses dipaparkan bersama Kepala Daerah, SKPD dan pihak yang bersangkutan lainnya. Lalu dibahas di Komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dokumentasi hasil reses selanjutnya disebut pokok pokok pikiran DPRD akan dibahas dalam forum SKPD bersama dengan hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan. Setelah itu dilaksanakan forum Musrenbang Kabupaten Bulukumba untuk menghasilkan RKPD. Hasil Reses ditampung saat perencanaan tepatnya saat penyusunan RKPD”

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisa bahwa dalam input yang digunakan dalam proses perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah, selain dari hasil Reses DPRD juga usulan itu bersumber dari pelaksanaan Musrenbang, yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat Kabupaten yang aspirasinya akan ditampung dalam forum SKPD.

Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki peranan dan fungsi dalam proses Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah yang mewakili aspirasi masyarakat sehingga aspirasi tersebut benar –benar teralisasi pada akhirnya dalam sebuah Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bulukumba. Partisipasi masyarakat yang efektif dalam proses pembuatan kebijakan adalah ketika masyarakat terlibat sepanjang proses pembuatan keputusan yang mengikat.

Kegiatan reses DPRD merupakan salah satu cara untuk masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan di Kabupaten Bulukumba, hasil reses DPRD digunakan tahapan pembuatan kebijakan di daerah. Terdapat tiga hal penting terkait penggunaan hasil reses DPRD tersebut. Hasil reses DPRD digunakan antara lain dimulai dari : sidang paripurna hasil reses, mencari masukan dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan, serta digunakan hasil reses dalam kebijakan umum APBD.

KESIMPULAN

1. Hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Khususnya daerah pemilihan III Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale sudah efektif dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Khususnya Daerah Pemilihan III Kecamatan Bulukumba dan Rilau Ale sudah berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan di Kabupaten Bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu
- Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Pembaharuan.
- Aminuddin, I., Ahmad, F., Sylvia, S., Azlan, A., & Fitriani, L. (2023). Laporan Rancangan Akhir Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Beriansyah, Alva. Mutiarin, Dyah. (2015). Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN & KEBIJAKAN PUBLIK*. Vol. 2 No. 2
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarwan. (2014). Motivasi kepemimpinan dan efektivitas kelompok. Jakarta: Rineka Cipta. Effendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H., Sylvia, S., Fitriani, L., & Nurhaedah, N. (2022). Kajian Evaluasi Sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2022. *Naskah Akademis*.